

## **Ekofeminisme Hindu Urban: Peran Perempuan Dalam Pelestarian Lingkungan Berbasis Tri Hita Karana Di Bandar Lampung**

**Wayan Sukarlinawati**  
Sekolah Tinggi Agama Hindu Lampung  
Email:karlinawayan@gmail.com

### **ABSTRAK**

Krisis ekologi di wilayah urban menempatkan perempuan pada posisi kerentanan tertinggi sekaligus menuntut adanya rekonstruksi nilai teologis dalam pelestarian alam. Penelitian ini bertujuan untuk mengeksplorasi bagaimana perempuan Hindu urban di Kota Bandar Lampung mengartikulasikan gerakan ekofeminisme dan mentransformasikan filsafat Tri Hita Karana dalam menjaga kelestarian lingkungan perkotaan. Menggunakan metode kualitatif deskriptif dengan pendekatan ekofeminisme, data dikumpulkan melalui wawancara mendalam terhadap pengurus dan anggota Wanita Hindu Dharma Indonesia (WHDI) Kota Bandar Lampung, observasi lapangan, serta studi dokumen.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa perempuan Hindu urban menunjukkan agensi ekologis yang kuat melalui tindakan adaptif di tengah keterbatasan lahan kota. Aktualisasi pilar *Palemahan* diwujudkan melalui ekofeminisme praktis harian, seperti pemanfaatan pekarangan sempit untuk tanaman upacara (*banten*), tata kelola mandiri sampah ritual organik, dan edukasi lingkungan berbasis nilai sakralisasi alam kepada generasi muda. Gerakan ini berhasil mengintegrasikan aspek spiritual (*Parahyangan*) dan sosial (*Pawongan*) menjadi aksi ekologis nyata. Penelitian ini menyimpulkan bahwa teologi ekologi lokal mampu ditransformasikan menjadi instrumen ketahanan lingkungan urban yang efektif ketika digerakkan oleh agensi perempuan di wilayah diaspora.

**Kata Kunci:** Ekofeminisme, Perempuan Hindu, Tri Hita Karana

### **I. Pendahuluan**

Krisis lingkungan perkotaan pada era modern saat ini memerlukan rekonstruksi nilai spiritual dan kultural di luar solusi teknologis (Sudarwanto & Handayani, 2019). Di Kota Bandar Lampung, manifestasi krisis ekologi ini terlihat nyata melalui masifnya alih fungsi ruang terbuka hijau, penurunan kualitas air tanah, serta eskalasi volume sampah domestik yang melampaui kapasitas pengelolaan berkelanjutan (BPS Kota Bandar Lampung, 2023). Fenomena degradasi lingkungan

perkotaan ini secara struktural menempatkan kelompok perempuan pada posisi kerentanan tertinggi akibat beban domestik tradisional yang melekat pada mereka. Sebagai penanggung jawab urusan rumah tangga, perempuan harus berinteraksi langsung secara harian dengan dampak pencemaran, krisis kesehatan keluarga, hingga beban fisik akibat kelangkaan air bersih. Guna membedah ketimpangan tersebut, perspektif ekofeminisme hadir sebagai pisau analisis kritis untuk membongkar keterkaitan erat antara eksploitasi alam semesta oleh sistem kapitalistik-

maskulin dengan subordinasi terhadap peran perempuan (Shiva & Mies, 1993).

Kaum perempuan sebenarnya memiliki potensi agensi ekologis yang besar untuk menginisiasi gerakan penyelamatan lingkungan melalui praktik swadaya di tengah tekanan struktural krisis urban (Wijayanti dkk., 2021). Secara historis, kekuatan agensi ini lahir dari kedekatan peran domestik mereka dalam mengelola dan memanfaatkan sumber daya alam harian secara langsung. Pada wilayah perkotaan yang heterogen, agensi perempuan tersebut dapat berjalan efektif ketika diintegrasikan dengan nilai teologis komunitas, yang dalam kosmologi Hindu termanifestasi lewat penghormatan terhadap figur ibu bumi (*Prthivi*). Landasan teologis merawat ekosistem ini berakar kuat pada falsafah *Tri Hita Karana* yang mengamanatkan keharmonisan universal melalui pilar *Parahyangan* (spiritual), *Pawongan* (sosial), dan *Palemahan* (alam) (Wiana, 2007). Penguatan nilai *Palemahan* inilah yang kemudian menjadi motor penggerak kesadaran ekologis perempuan untuk memperlakukan alam sebagai bagian dari kesatuan makrokosmos yang suci.

Aktualisasi ajaran *Palemahan* berbasis ekofeminisme Hindu tersebut sayangnya harus menghadapi tantangan ruang dan resistensi sosial yang kompleks di tengah realitas masyarakat urban yang pragmatis (Nofiyanti, 2020). Perkembangan modernisasi perkotaan dan penyusutan lahan harian secara perlahan mulai mengaburkan kesadaran kolektif masyarakat akan nilai-nilai sakralisasi alam. Fenomena ketegangan ruang ini menjadi sangat unik pada komunitas Hindu urban yang hidup sebagai masyarakat diaspora di Kota Bandar Lampung. Sebagai kelompok minoritas di wilayah urban yang heterogen, mereka tidak hanya menghadapi polusi kota dan minimnya

ruang hijau, tetapi juga tantangan eksistensial untuk mempertahankan ritualitas keagamaan harian yang membutuhkan sarana-sarana alami dari ekosistem alam. Merespons keterbatasan tersebut, organisasi Wanita Hindu Dharma Indonesia (WHDI) Kota Bandar Lampung muncul mengambil peran krusial sebagai agen perubahan di lapangan. Gerakan ekofeminisme praktis mereka tunjukkan melalui berbagai upaya adaptif, seperti pemanfaatan pekarangan sempit untuk tanaman upacara (*banten*), tata kelola sampah ritual organik secara mandiri, hingga pemberian edukasi pelestarian lingkungan kepada generasi muda.

Secara konseptual, gerakan ekofeminisme praktis yang diinisiasi oleh WHDI Kota Bandar Lampung tidak sekadar menjadi respons teknis terhadap keterbatasan lahan, melainkan sebuah bentuk perlawanan kultural terhadap pemisahan ruang domestik dan publik yang maskulin. Melalui aktivitas domestik yang dieksplorasi ke ranah komunitas, perempuan Hindu urban mampu menggeser paradigma pengelolaan lingkungan yang biasanya bersifat *top-down* dan mekanistik menjadi lebih organik dan spiritual (Warren, 2000). Pemilihan tanaman upacara (*banten*) di pekarangan sempit, misalnya, bukan hanya pemenuhan kebutuhan ritual, tetapi juga tindakan politik ekologis (*ecopolitics*) berskala mikro yang mereklamasi hak atas ruang hijau di tengah beton perkotaan. Dengan demikian, interaksi harian ini menciptakan ikatan emosional dan spiritual yang mendalam, di mana kelestarian ekosistem kota dipandang setara dengan menjaga kesucian altar ibadah mereka sendiri.

Penelitian ini secara teoretis memberikan kontribusi penting bagi diskursus sosiologi agama urban melalui pembongkaran stereotipe

bahwa komunitas minoritas diaspora cenderung pasif dalam isu kelestarian lingkungan. Melalui lensa ekofeminisme Hindu, artikulasi gerakan yang digerakkan oleh WHDI Kota Bandar Lampung membuktikan bahwa kesadaran ekologis dapat menjadi jangkar identitas kultural yang memperkuat resiliensi komunitas. Pemilihan Kota Bandar Lampung sebagai lokus penelitian didasarkan pada karakteristik sosiologisnya yang unik sebagai ruang transisi budaya yang memicu kontestasi pemanfaatan lahan. Dinamika ini menuntut perempuan Hindu urban untuk menjadi negosiator ulung yang mampu menyulap sudut-sudut sempit perkotaan menjadi kantong-kantong ekologi suci. Keberhasilan penataan ini membuktikan bahwa pemulihan ekologi perkotaan tidak selalu membutuhkan investasi teknologi yang mahal, melainkan rekonstruksi kesadaran spiritual yang konsisten di tingkat domestik.

Rekonstruksi radikal atas ajaran *Tri Hita Karana* yang menempatkan pilar *Palemahan* (alam) sebagai ruang ekologi mikro-spiritual. Kebaruan tersebut melampaui keterbatasan studi-studi terdahulu dengan membongkar bagaimana agensi perempuan dalam organisasi WHDI Kota Bandar Lampung mampu memutus batasan dikotomi domestik-publik. Melalui gerakan ini, pemanfaatan pekarangan sempit dan tata kelola sampah ritual tidak lagi dipandang sekadar sebagai tindakan bertahan hidup (*survival mechanism*), melainkan sebuah bentuk perlawanan kultural dan negosiasi ruang suci (*sacred space*) di tengah lanskap kota yang maskulin-pragmatis. Dengan demikian, penelitian ini menawarkan cara pandang baru dalam sosiologi agama bahwa teologi lingkungan tidak bersifat statis, melainkan adaptif, resilien, dan

digerakkan secara dinamis oleh kelompok perempuan minoritas di wilayah diaspora.

Keterbatasan literatur mengenai teologi ekologi Hindu selama ini bersumber dari isolasi fokus studi terdahulu yang mayoritas hanya mengkaji konteks pedesaan agraria di Pulau Bali (Gudang Jurnal, 2024). Dominasi riset berbasis kelokalan Bali tersebut menyisakan celah kajian (*research gap*) yang signifikan mengenai pola adaptasi komunitas Hindu minoritas di luar Bali khususnya perempuan Hindu urban di Kota Bandar Lampung dalam merekonstruksi nilai ekologis di tengah ruang kota yang padat. Perempuan Hindu perkotaan dalam konteks ini memikul tanggung jawab ganda, yaitu menjaga kesucian ritual keagamaan (*Parahyangan*) sekaligus memelopori gerakan hijau praktis (*Palemahan*) pada ruang hidup yang terbatas. Oleh karena itu, penelitian ini bertujuan untuk mengisi kekosongan akademis tersebut dengan mengeksplorasi secara kritis bagaimana perempuan Hindu urban di Kota Bandar Lampung mengartikulasikan gerakan ekofeminisme serta mentransformasikan konsep *Tri Hita Karana* demi menjaga kelestarian lingkungan perkotaan.

## **II. Pembahasan**

### **1. Agensi dan Peran Praktis Perempuan Hindu (WHDI) dalam Pelestarian Lingkungan Urban di Bandar Lampung**

Perempuan Hindu di Kota Bandar Lampung yang tergabung dalam Wanita Hindu Dharma Indonesia (WHDI) menunjukkan agensi ekologis yang kuat sebagai bentuk adaptasi terhadap keterbatasan ruang kota. Tekanan struktural urban, seperti minimnya ruang terbuka hijau dan

masifnya tumpukan sampah domestik, tidak memosisikan perempuan sekadar sebagai korban pasif (Astuti, 2012). Sebaliknya, keterbatasan ekologis ini memicu munculnya gerakan swadaya domestik. Hasil pengamatan di lapangan menunjukkan bahwa para perempuan Hindu memanfaatkan pekarangan rumah mereka yang sangat terbatas untuk budidaya tanaman upacara atau dikenal sebagai kebun ekoteologi. Jenis tanaman yang ditanam meliputi unsur-unsur penting untuk sarana *banten*, seperti bunga kamboja, daun pandan, kelapa gading, dan sirih. Langkah ini tidak hanya menjadi solusi pragmatis untuk mengatasi kelangkaan bahan ritual di wilayah perkotaan, tetapi juga secara simultan memperluas luasan ruang hijau mikro di kawasan hunian padat Bandar Lampung.

Aksi ekofeminisme praktis oleh WHDI Kota Bandar Lampung diwujudkan secara nyata melalui tata kelola sampah ritual keagamaan berbasis pemilahan rumah tangga. Kegiatan keagamaan Hindu harian menghasilkan sisa sarana upacara organik (seperti janur, bunga, dan buah) yang jika tidak dikelola akan menumpuk di tempat pembuangan akhir (Wijayanti dkk., 2021). Merespons hal tersebut, WHDI Kota Bandar Lampung menginisiasi program pembuatan kompos mandiri dari sisa-sisa sarana *banten*. Sampah organik ritual dikumpulkan, dicacah, dan diolah menjadi pupuk organik yang kemudian digunakan kembali untuk menyuburkan tanaman pekarangan sempit mereka. Melalui tindakan kolektif ini, perempuan Hindu urban berhasil memutus rantai timbulan sampah domestik dari hulu sekaligus mengubah limbah sakral menjadi berkah ekologis yang menyuburkan bumi.

Agensi ekologis yang ditunjukkan oleh WHDI Kota Bandar Lampung meluas secara terstruktur

pada dimensi edukasi transformatif bagi generasi muda Hindu urban. Menyadari bahwa modernisasi perkotaan berpotensi memutus kepekaan ekologis generasi muda, WHDI mengintegrasikan praktik pelestarian lingkungan ke dalam ruang-ruang pasraman (sekolah minggu Hindu) dan kegiatan pemuda (*Sekaa Teruna Teruni*). Perempuan Hindu dalam konteks ini bertindak sebagai mentor kultural yang mengajarkan bahwa ritualitas tidak boleh dilepaskan dari tanggung jawab ekologis. Remaja diajarkan cara memilah sampah sisa upacara secara langsung setelah sembahyang dan diperkenalkan pada filosofi bahwa merawat tanaman *banten* adalah bentuk nyata dari meditasi kehidupan. Lewat transmisi kultural yang digerakkan oleh figur ibu ini, WHDI berhasil membangun benteng kesadaran ekologis kolektif yang memastikan bahwa nilai sosio religius *Palemahan* tetap lestari di tengah gempuran arus pragmatisme kota.

Gerakan ekofeminisme praktis ini di sisi lain menyingkap adanya ruang negosiasi yang rumit terkait beban ganda (*double burden*) yang dipikul oleh perempuan Hindu urban. Di tengah tuntutan ekonomi perkotaan yang memaksa sebagian besar anggota WHDI untuk bekerja di sektor publik, mereka tetap harus memikul tanggung jawab domestik tradisional serta menjaga kesucian ritual keagamaan (Sudarwanto & Handayani, 2019). Mengelola kebun ekoteologi di pekarangan sempit dan memproses kompos mandiri dari limbah *banten* membutuhkan alokasi waktu dan energi ekstra yang tidak sedikit.

## **2. Internalisasi Tri Hita Karana sebagai Fondasi Teologi Ekofeminisme Urban**

Aktualisasi pilar Tri Hita Karana oleh komunitas perempuan Hindu di Bandar Lampung mengalami proses redefinisi ruang yang mengintegrasikan aspek spiritual, sosial, dan ekologis secara utuh (Wiana, 2007). Di tengah arus modernisasi perkotaan yang cenderung sekuler, pilar *Parahyangan* (hubungan dengan Tuhan) tidak lagi dimaknai sebatas pemujaan di dalam Pura, melainkan diwujudkan melalui kesadaran menjaga kesucian makrokosmos (*Bhumi*). Ketika perempuan merawat tanaman upacara di pekarangan hunian, mereka sedang melakukan ritual harian yang menghubungkan pengabdian spiritual kepada Sang Pencipta dengan pelestarian fisik alam semesta (Wastra, 2012). Dimensi teologis ini menjadi motor penggerak utama bagi perempuan Hindu urban, di mana aktivitas mencangkul, menyiram tanaman, dan mengolah kompos dinilai setara dengan tindakan ibadah (*yadnya*).

Pilar Pawongan dan Palemahan ditransformasikan oleh perempuan Hindu urban menjadi modal sosial untuk membangun ketahanan lingkungan perkotaan yang berkelanjutan. Melalui arisan rutin dan pertemuan keagamaan WHDI di Bandar Lampung, pilar *Pawongan* (hubungan antarmanusia) digunakan sebagai ruang edukasi ekologis antar-anggota. Perempuan senior memberikan pemahaman kepada generasi muda mengenai pentingnya meminimalkan penggunaan plastik sekali pakai saat mempersiapkan sarana persembahyangan. Pola transfer pengetahuan ini memperkuat pilar *Palemahan* (hubungan dengan alam), di mana kesadaran menjaga alam tidak bergerak secara individual, melainkan menjadi gerakan kultural yang terorganisir. Pola integrasi nilai-nilai ini membuktikan bahwa konsep kosmologi

tradisional Hindu yang berasal dari pedesaan dapat diadaptasikan secara fleksibel untuk menjawab tantangan krisis ekologi di tengah realitas kosmopolitan kota (Nofiyanti, 2020).

Manifestasi ajaran *Palemahan* dalam konteks ekofeminisme urban diartikulasikan secara radikal oleh perempuan Hindu diaspora melalui rekonstruksi konsep Ibu Bumi (*Prthivi*). Bagi para perempuan penggerak WHDI di Bandar Lampung, penghormatan terhadap *Prthivi* tidak lagi diwujudkan dalam bentuk ritual pemujaan yang abstrak di dalam pura besar, melainkan melalui tindakan nyata untuk menyembuhkan bumi dari krisis ekologi kota. Doktrin teologis ini memberikan legitimasi spiritual bagi perempuan untuk mengambil peran kepemimpinan di ranah publik-ekologis, menembus batas-batas patriarki tradisional yang biasanya membatasi perempuan hanya pada urusan dapur. Aktivitas sehari-hari seperti memilah sampah ritual, membuat pupuk kompos, dan menghemat penggunaan air tanah diresapi sebagai bentuk persembahan suci (*yadnya*) yang setara nilainya dengan mempersembahkan sesajen di atas altar ibadah.

Integrasi antara pilar *Pawongan* dan *Palemahan* di dalam ruang urban mewujudkan nyata melalui penguatan solidaritas kolektif sosioreligius sesama perempuan minoritas. Di tengah masyarakat Kota Bandar Lampung yang heterogen dan individualis, organisasi WHDI bertransformasi menjadi ruang aman (*safe space*) sekaligus wadah konsolidasi gerakan hijau bagi perempuan Hindu diaspora (Nofiyanti, 2020). Hubungan harmonis antarsesama manusia (*Pawongan*) diikat oleh komitmen bersama untuk saling menyokong dalam pemenuhan sarana ritual berbasis lingkungan, seperti kegiatan barter bibit tanaman

*banten* atau kerja bakti pembersihan lingkungan pura.

Solidaritas sosio religius yang digerakkan oleh perempuan ini membuktikan bahwa pelestarian lingkungan perkotaan tidak dapat berjalan secara individual, melainkan membutuhkan jejaring sosial komunal yang memiliki frekuensi spiritualitas dan tujuan ekologis yang sama. Data hasil wawancara mendalam dengan pengurus WHDI Kota Bandar Lampung mengonfirmasi bahwa internalisasi teologi lingkungan ini telah mengubah cara pandang mereka terhadap sisa sarana upacara. Bagi perempuan Hindu urban, sisa buah, daun janur, dan bunga dari ritual harian bukanlah limbah kotor yang harus didepak ke tempat pembuangan akhir, melainkan bagian dari tubuh Ibu Bumi yang kesuciannya harus dikembalikan secara terhormat. Ibu Dayu (48 tahun), salah satu anggota WHDI di Bandar Lampung, menjelaskan sebagai berikut:

"Bagi kami, sampah *banten* itu bukan sampah biasa. Itu adalah bekas persembahan kepada Tuhan, jadi alam sudah memberikan sarana kepada kami, masa setelah dipakai kita buang sembarangan sampai mengotori kota? Makanya kami olah jadi kompos. Kami kembalikan lagi ke tanah pekarangan untuk menyuburkan tanaman bunga kamboja dan sirih yang nanti dipakai buat *banten* lagi. Ini cara kami menjalankan *Palemahan* dan *Parahyangan* sekaligus di rumah yang lahannya sempit."

Narasi lapangan tersebut membuktikan bahwa keterbatasan modal spasial di wilayah urban tidak menyurutkan agensi perempuan Hindu untuk menegosiasikan ruang sakral mereka. Melalui pemanfaatan pot-pot gantung dan rak hidroponik vertikal di dinding rumah, perempuan Hindu diaspora di Bandar Lampung berhasil

mematahkan asumsi bahwa ajaran *Palemahan* hanya bisa dijalankan di pedesaan Bali yang luas. Ibu Ketut W. (52 tahun), seorang tokoh perempuan WHDI Kota Bandar Lampung, menambahkan dalam wawancara sebagai berikut:

"Di Bandar Lampung ini cari daun pandan, bunga kamboja segar, atau kelapa gading untuk upacara itu susah dan mahal kalau harus beli terus di pasar. Sebagai ibu rumah tangga, kami harus memutar otak. Kami memanfaatkan gang-gang sempit dan sisa halaman depan rumah untuk menanam sendiri. Jadi, selain menghemat pengeluaran dapur, rumah kami jadi hijau, udara kota yang polusi ini jadi agak segar, dan kami tidak kehilangan akar budaya kami sebagai orang Hindu meskipun hidup di perantauan."

Analisis terhadap pernyataan Ibu Ketut W. menyingkap bahwa motif ekonomi domestik dan panggilan spiritualitas *Tri Hita Karana* telah melebur menjadi satu kesatuan motivasi gerakan. Perempuan Hindu urban tidak melihat aktivitas menanam di lahan sempit ini sekadar sebagai hobi atau strategi menghemat pengeluaran pasar, melainkan sebagai sebuah kewajiban moral untuk menjaga kelangsungan ritus agama (*Parahyangan*) sekaligus memulihkan kualitas udara kota (*Palemahan*). Keberhasilan mereka menyulap sudut-sudut beton perkotaan yang gersang menjadi kantong-kantong hijau membuktikan bahwa di tangan perempuan, keterbatasan ruang urban dimediasi secara cerdas melalui pendekatan teologi praktis yang berpusat pada pemeliharaan kehidupan. Refleksi teologis ini secara empiris memperlihatkan bahwa bagi komunitas minoritas, kelestarian ekosistem lokal memiliki kaitan erat dengan strategi pertahanan identitas kultural (*cultural identity survival*). Pada ruang kota Bandar Lampung yang heterogen dan

cenderung asimilatif, ketergantungan ritual Hindu pada sarana-sarana alami dari alam menjadikan isu degradasi lingkungan sebagai ancaman langsung terhadap eksistensi spiritualitas mereka. Ketika ruang terbuka hijau menyusut dan tanaman ritual semakin langka akibat pembangunan kota, perempuan Hindu tidak sekadar kehilangan vegetasi, melainkan kehilangan medium komunikasi sakral dengan pencipta. Oleh karena itu, gerakan hijau yang digerakkan oleh para perempuan WHDI melalui kebun ekoteologi di pekarangan rumah.

### **3. Tantangan Ruang dan Resistensi Sosial dalam Aktualisasi Ekofeminisme Urban**

Aktualisasi gerakan ekofeminisme praktis oleh Wanita Hindu Dharma Indonesia (WHDI) Kota Bandar Lampung menghadapi hambatan struktural yang signifikan berupa keterbatasan modal spasial akibat kebijakan tata ruang kota yang teknokratis. Sebagai wilayah urban yang sedang berkembang pesat, tata ruang Kota Bandar Lampung cenderung didominasi oleh kepentingan ekonomi komersial yang memicu maraknya alih fungsi lahan dan penyusutan ruang terbuka hijau. Kondisi ini menempatkan komunitas Hindu diaspora sebagai kelompok minoritas pada posisi yang rentan karena mereka tidak memiliki akses atau otoritas politik yang cukup untuk memengaruhi kebijakan makro tata kota. Akibatnya, perempuan Hindu urban dipaksa memikul beban ekologis ganda, di mana mereka harus berjuang keras melestarikan ruang hijau mikro secara mandiri di tingkat domestik demi menambal kegagalan sistemik pemerintah dalam menyediakan ruang

terbuka hijau yang inklusif secara kultural.

Ketegangan sosial berupa resistensi terselubung dari masyarakat sekitar turut mewarnai dinamika pergerakan perempuan Hindu urban dalam mengelola lingkungan komunal. Di tengah realitas masyarakat Kota Bandar Lampung yang heterogen dan multikultural, aktivitas ritual keagamaan Hindu harian terkadang masih dipandang dengan penuh kecurigaan atau ketidakpahaman oleh sebagian kelompok mayoritas. Ketika para perempuan WHDI berupaya melakukan penataan ekologis komunal, seperti menanam tanaman upacara di bahu-bahu jalan gang atau mengelola tempat pembuangan sampah ritual organik secara kolektif di sekitar lingkungan tempat tinggal, mereka kerap kali berbenturan dengan ego sektoral dan stigma sosial. Resistensi ini tidak selalu mewujud dalam konflik fisik terbuka, melainkan berupa tindakan pengabaian, protes verbal skala mikro, hingga kerusakan tanaman banten oleh oknum warga yang menganggap aktivitas kultural tersebut sebagai bentuk penyalahgunaan fasilitas umum.

Tuntutan peran domestik yang bertumpuk dengan peran ekonomi di sektor publik perkotaan telah menguras energi fisik dan mental para anggota WHDI. Di satu sisi, mereka dibebani tanggung jawab moral-keagamaan untuk memastikan kesucian ritual (*Parahyangan*) dan kebersihan lingkungan (*Palemahan*), namun di sisi lain, mereka tidak mendapatkan insentif, fasilitas pendukung, maupun pengakuan sosial yang memadai dari otoritas kota. Akibat absennya dukungan struktural yang sensitif jender ini, intensitas gerakan hijau praktis yang diinisiasi oleh perempuan Hindu urban rentan mengalami fluktuasi dan penurunan konsistensi,

yang pada jangka panjang dapat mengancam proses transmisi nilai teologi ekologi kepada generasi penerus. Kondisi keterbatasan ekologis ini diperparah oleh minimnya integrasi dan pengakuan dari pemerintah daerah setempat terhadap kontribusi lingkungan yang telah dilakukan oleh WHDI. Kebijakan mitigasi krisis lingkungan dan program pengelolaan sampah yang dicanangkan oleh Pemerintah Kota Bandar Lampung sejauh ini masih berjalan secara *top-down* dan cenderung mengabaikan inisiatif lokal berbasis komunitas spiritual minoritas. Program-program dinas terkait sering kali berjalan sendiri tanpa pernah melirik potensial agensi perempuan Hindu urban yang sebenarnya sudah berhasil memutus rantai timbulan sampah organik di tingkat hulu rumah tangga. Absennya kemitraan strategis (*strategic partnership*) dan insentif dari pemerintah daerah ini tidak hanya membuat gerakan ekofeminisme WHDI berjalan secara terisolasi tanpa duplikasi massal, tetapi juga mencerminkan masih kuatnya bias teknokratis-maskulin dalam tata kelola lingkungan perkotaan modern.

Data empiris di lapangan memperlihatkan bahwa benturan ruang akibat perbedaan cara pandang kultural sering kali membatasi ruang gerak perempuan Hindu dalam mengaktualisasikan ajaran *Palemahan*. Ketika anggota WHDI mencoba menghijaukan gang pemukiman yang padat dengan tanaman banten, inisiatif ini tidak jarang direspons secara dingin bahkan mendapatkan resistensi verbal dari tetangga sekitar yang berbeda keyakinan. Ibu Kadek (42 tahun), salah satu pengurus WHDI di di Bandar Lampung, menceritakan pengalamannya sebagai berikut :

"Waktu itu kami berinisiatif menanam pohon pandan dan bunga

pacar air di pot-pot sepanjang pinggir gang rumah, maksudnya biar rimbun dan kalau mau sembahyang tidak usah beli lagi ke pasar. Tapi ada tetangga yang protes, katanya gang jadi sempit dan pot-pot itu mengganggu jalan, padahal ukurannya kecil. Bahkan, kadang bunga-bunga yang sudah mekar malah dipetik sembarangan atau potnya digeser sampai pecah. Kami akhirnya mengalah dan memindahkan pot-pot itu masuk ke dalam pagar rumah masing-masing saja daripada ribut."

Hasil wawancara dengan Ibu Kadek dapat dikatakan bahwa adanya kontestasi ruang sakral yang timpang dimana kelompok minoritas diaspora dipaksa mengalah dalam ruang publik perkotaan. Protes verbal skala mikro dan tindakan perusakan pot tersebut bukan sekadar masalah tata letak tanaman, melainkan representasi dari belum dewasanya toleransi ekologis-spasial di tengah masyarakat urban yang heterogen. Fenomena ini memaksa perempuan Hindu melakukan domestikasi ulang terhadap gerakan hijaunya mundur kembali dari wilayah komunal gang kota ke dalam batas pagar pekarangan rumah pribadi. Konsekuensinya, kontribusi ekofeminisme WHDI yang semula berpotensi memberikan dampak estetika dan ekologis bagi ruang publik menjadi terhambat dan terisolasi akibat ego sektoral masyarakat sekelilingnya.

Aktualisasi gerakan ekofeminisme praktis oleh Wanita Hindu Dharma Indonesia (WHDI) Kota Bandar Lampung menghadapi hambatan struktural yang signifikan berupa keterbatasan modal spasial akibat kebijakan tata ruang kota yang teknokratis. Sebagai wilayah urban yang sedang berkembang pesat, tata ruang Kota Bandar Lampung cenderung didominasi oleh kepentingan ekonomi komersial yang memicu maraknya alih fungsi lahan dan

penyusutan ruang terbuka hijau. Kondisi ini menempatkan komunitas Hindu diaspora—sebagai kelompok minoritas—pada posisi yang rentan karena mereka tidak memiliki akses atau otoritas politik yang cukup untuk memengaruhi kebijakan makro tata kota. Akibatnya, perempuan Hindu urban dipaksa memikul beban ekologis ganda, di mana mereka harus berjuang keras melestarikan ruang hijau mikro secara mandiri di tingkat domestik demi menambal kegagalan sistemik pemerintah dalam menyediakan ruang terbuka hijau yang inklusif secara kultural.

Kondisi keterbatasan ekologis ini diperparah oleh minimnya integrasi dan pengakuan dari pemerintah daerah setempat terhadap kontribusi lingkungan yang telah dilakukan oleh WHDI. Kebijakan mitigasi krisis lingkungan dan program pengelolaan sampah yang dicanangkan oleh Pemerintah Kota Bandar Lampung sejauh ini masih berjalan secara *top-down* dan cenderung mengabaikan inisiatif lokal berbasis komunitas spiritual minoritas. Program-program dinas terkait sering kali berjalan sendiri tanpa pernah melirik potensial agensi perempuan Hindu urban yang sebenarnya sudah berhasil memutus rantai timbulan sampah organik di tingkat hulu rumah tangga. Absennya kemitraan strategis (*strategic partnership*) dan insentif dari pemerintah daerah ini tidak hanya membuat gerakan ekofeminisme WHDI berjalan secara terisolasi tanpa duplikasi massal, tetapi juga mencerminkan masih kuatnya bias teknokratis-maskulin dalam tata kelola lingkungan perkotaan modern.

### **III. Penutup**

Perempuan Hindu urban di Kota Bandar Lampung yang tergabung

dalam Wanita Hindu Dharma Indonesia (WHDI) memiliki agensi ekologis yang kuat dalam merespons krisis lingkungan perkotaan. Di tengah tekanan struktural berupa keterbatasan lahan dan masalah akumulasi sampah kota, mereka mampu menginisiasi gerakan ekofeminisme praktis yang adaptif. Peran nyata tersebut diwujudkan melalui pemanfaatan pekarangan rumah yang sempit sebagai kebun ekoteologi untuk pemenuhan tanaman upacara (*banten*), serta pengelolaan mandiri limbah organik sisa ritual keagamaan menjadi pupuk kompos yang bermanfaat bagi kesuburan tanah.

Gerakan ekofeminisme praktis kaum perempuan ini digerakkan oleh proses kontekstual terhadap nilai-nilai filsafat Tri Hita Karana di ruang urban. Pilar *Parahyangan* ditransformasikan dari sekadar pemujaan ritual di dalam Pura menjadi kesadaran spiritual untuk menjaga kesucian makrokosmos. Dimensi spiritual tersebut kemudian diintegrasikan secara harmonis dengan pilar *Pawongan* sebagai modal sosial edukasi lingkungan antar-anggota, serta pilar *Palemahan* sebagai aksi nyata pelestarian alam kota. Integrasi utuh ini membuktikan bahwa teologi ekologi tradisional mampu melintasi batas geografis pedesaan agraria dan bertransformasi menjadi instrumen ketahanan lingkungan perkotaan yang efektif di wilayah diaspora.

Gerakan WHDI di Bandar Lampung membuktikan bahwa kelestarian ekosistem lokal memiliki keterkaitan erat dengan strategi pertahanan identitas kultural (*cultural identity survival*). Bagi perempuan Hindu urban, merawat kesucian alam kota bukan lagi aktivitas sekuler biasa, melainkan bentuk kewajiban moral-keagamaan (*yadnya*) yang sakral demi memastikan keberlanjutan tradisi leluhur mereka di tanah perantauan.

### **Daftar Pustaka**

- Astuti, T. M. P. (2012). Ekofeminisme dan peran perempuan dalam lingkungan. *Indonesian Journal of Conservation*, 1(1), 1-13.
- Badan Pusat Statistik Kota Bandar Lampung. (2023). *Kota Bandar Lampung dalam Angka 2023*. Bandar Lampung: BPS.
- Gudang Jurnal. (2024). *Meta-analisis implementasi filsafat Tri Hita Karana pada masyarakat pedesaan agraria*. Jakarta: Pusat Kajian Budaya.
- Nofiyanti, T. (2020). Teologi lingkungan dan tantangan masyarakat urban modern. *Jurnal Sosiologi Perkotaan*, 4(1), 12-25.
- Shiva, V., & Mies, M. (1993). *Ecofeminism*. London: Zed Books.
- Sudarwanto, A. S., & Handayani, I. G. A. K. R. (2019). Hukum lingkungan dan krisis ekologi perkotaan di Indonesia. *Jurnal Hukum Lingkungan Indonesia*, 5(2), 180-195.
- Wastra, I W. (2012). *Pelestarian Lingkungan Menurut Agama Hindu Dalam Teks dan Konteks*. Denpasar: Widya Dharma.
- Wiana, I. K. (2007). *Tri Hita Karana Menurut Konsep Hindu*. Surabaya: Paramita.
- Wijayanti, I., Setyowati, Y., & Rahmawati, D. (2021). Gerakan ekofeminisme dalam pemberdayaan perempuan pengolah limbah. *Jurnal Sosiologi Reflektif*, 15(2), 245-267.